

JURNAL KEADILAN

Analisis Yuridis Terhadap Timbulnya Hutang Pajak
M. Fadli Nasution, S.H, M.H

Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Ismail, S.H.,M.H

Pembangunan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Murniati E. Sulastri, M.Pd

Kebijakan Pemerintah Dalam Birokrasi dan Keuangan Daerah
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H

Penerapan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Memberikan Fasilitas
Melakukan Tindak Pidana Perjudian
Ari Dermawan, S.H., M.H

Penerapan Model *Problem Based Learning* Pada Pembelajaran Aspek Hukum
Dalam Perdagangan Bebas Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Sebagai Upaya Peningkatan Proses dan
Hasil Belajar
M. Syukran Yamin Lubis Dan Harisman

Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia
Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum

Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter
Syafirizal, S.H., M.H



DITERBITKAN OLEH:
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAH

Volume 5, No. 2 Juli-Desember 2018

ISSN 2355-5130



JURNAL Keadilan

**DITERBITKAN OLEH:
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN
Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan**



JURNAL KEADILAN

Penanggung Jawab:

Ratmi Susiani Sagala

(Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan)

Pemimpin Redaksi:

Asnur Disyahputra

Tim Redaksi:

Fahrul Rizal

Murniati E. Sulastri

Zulhadi Tasrik

Rusmanto

Tim Ahli:

Muhammad Rito

Indra Prasetio

Alpun Khoir Nasution

Mangaraja Manurung

Tata Usaha:

Nurhanifah

Tuti Rahmadani

Alamat Redaksi:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN**

Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan, 21223

Telp. (0623) 4562005, E-mail: stihmakisaran@yahoo.co.id

Pengantar Redaksi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum W.W.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, Jurnal Keadilan dapat diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan. Jurnal ini diharapkan mampu menjadi “jembatan emas” dalam mempublikasikan ide cemerlang penulis dengan pembaca, selain itu juga diharapkan menjadi motifasi dalam mengembangkan dan memajukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan menjadi lebih beriman, berilmu dan profesional dibidang hukum.

Redaksi menyadari bahwa penerbitan Jurnal Keadilan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun bukan berarti kekurangan dan keterbatasan tersebut menjadi hambatan untuk tidak berbuat. Lebih baik berbuat daripada tidak sama sekali.

Kepada segenap pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal Keadilan, tim redaksi mengucapkan terimakasih. Semoga usaha kita untuk menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan menjadi lebih beriman, berilmu dan profesional di bidang hukumdiridhoi oleh Allah SWT., Amin.

Wabillahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum W.W.

Kisaran, Desember 2018

Pemimpin Redaksi

ASNUR DISYAHPUTRA

Daftar Isi:

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIMBULNYA HUTANG PAJAK	
M. FADLI NASUTION, S.H.,M.H.	1
HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN	
ISMAIL, S.H.,M.H.	12
PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	
MURNIATI E. SULASTRI, M.Pd.	30
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIROKRASI DAN KEUANGAN DAERAH	
RATMI SUSIANI SAGALA, S.H., M.H.	45
PENERAPAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBERIKAN FASILITAS MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN	
ARI DERMAWAN, S.H., M.H.	66
PENERAPAN MODEL <i>PROBLEM BASED LEARNING</i> PADA PEMBELAJARAN ASPEK HUKUM DALAM PERDAGANGAN BEBAS BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA SEBAGAI UPAYA PENIGKATAN PROSES DAN HASIL BELAJAR	
M. SYUKRAN YAMIN LUBIS DAN HARISMAN	87
PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA	
Dr. BUDI SASTRA PANJAITAN, S.H., M.Hum.	113
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER	
SYAFRIZAL, S.H., M.H.	133

PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Dr. BUDI SASTRA PANJAITAN, S.H., M.Hum.¹

Abstrak

Hukum acara pidana Indonesia yang berlaku sekarang tidak lepas dari runtutan sejarah yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Hukum pidana Indonesia pada waktu itu tidaklah mencerminkan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pancasila, semata-mata hanya memenuhi “rasa aman” bagi *Vereenigde Oostindische Compagnie*. Melihat perkembangan yang terjadi, sudah sewajarnya Indonesia melakukan perubahan kitap undang-undang hukum acara pidana yang lebih berlandaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Acara Pidana, keadilan, Indonesia*

A. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia

Sebelum berlaku peraturan yang terkait dengan hukum pidana yang dikembangkan oleh Pemerintah Belanda melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), di wilayah Indonesia telah berlaku peraturan adat baik yang berhubungan dengan hukum privat maupun hukum publik yang kesemuanya disebut hukum adat (*adatrecht*). “Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat”.² Sumber hukum pidana adat dapat tertulis maupun tidak tertulis.

“Dalam bentuk tertulis misalnya Kitab Ciwasasana atau Kitab Purwadhigama pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya di Palembang, Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung, Kitab Lontara “ade” di Sulawesi Selatan, Kitab Adi Agama dan Awig-Awig di Bali”.³

¹ Dosen Tetap Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

² Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, hal. 227

³ *Ibid*, hal. 228

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum pidana adat secara pelan-pelan digeser oleh hukum yang dilahirkan melalui asas konkordansi. Melalui asas konkordansi, perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi di Negeri Belanda turut diberlakukan di Indonesia. Khusus dalam hukum acara pidana beberapa peraturan tersebut antara lain:

1. *Reglement op de rechterlijkeorganisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*, yang lazim dikenal sebagai RO (Stb 1847-23), mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman;
2. *Inlandsch Reglement* (Stb 1848 Nomor 16), mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata dipersidangan bagi mereka yang tergolong penduduk pribumi dan timur asing seperti cina dan arab;
3. *Reglement ofstrafvordering* (Stb. 1849 Nomor 63), mengatur tentang hukum acara pidana bagi golongan penduduk eropa dan yang dipersamakan;
4. *Landgerechtsreglement* (Stb 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323), mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua golongan penduduk.

Dalam perkembangannya, *Inlandsch Reglement* diperbaharui menjadi Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), yang mendapatkan persetujuan dari *Volksraad*⁴ pada tahun

⁴ *Volksraad* diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur asing tionghoa, arab dan india. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Lebih lanjut lihat Wikipedia

1941 (Stb 1941 Nomor 44). HIR memuat reorganisasi penuntutan dan pembaharuan terhadap pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana. Melalui HIR, muncul Lembaga Penuntut Umum (*Openbare Ministerie*) yang berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah pamongpraja.⁵

Pada masa pendudukan Jepang, tidak terjadi perubahan fundamental terhadap perkembangan hukum acara pidana, kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Melalui Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1942, dinyatakan berlakunya semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda selama tidak bertentangan dengan kekuasaan Jepang, sehingga HIR tetap dinyatakan berlaku untuk pengadilan negeri (*tihoos hoin*), pengadilan tinggi (*koot hoin*) dan pengadilan agung (*saiko hooiin*).⁶

“Dengan demikian, acara pidana pun pada umumnya tidak berubah. *HIR* dan *reglement voor de Buitengewesten* serta *Landgerechtsreglement* berlaku untuk Pengadilan Negeri (*Tihoos Hoin*), Pengadilan Tinggi (*Koot Hoin*) dan Pengadilan Agung (*Saiko Hooiin*).⁷

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah telah memiliki dasar hukum sebagai sebuah negara dan untuk kepentingan tersebut pemerintah melakukan penyesuaian hukum yang ada dengan kearifan lokal (*local wisdom*), salah satunya adalah berkaitan dengan hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, HIR masih tetap diberlakukan, pemberlakuan ini juga diperkuat

⁵ Walaupun telah dibentuk penuntut umum yang berdiri sendiri, namun dalam beberapa wilayah Indonesia, penuntut umum masih dijabat oleh pamongpraja. Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 51

⁶ Susunan pengadilan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942

⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 53

melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.⁸

Pada tahun 1965 dibuatlah Rancangan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun dalam perkembangannya RKUHAP tersebut ditarik kembali karena dianggap kurang sempurna. Untuk perkembangan selanjutnya, pembahasan RKUHAP seperti berikut ini:

1. Pada tahun 1967 dibentuk panitia intern Departemen Kehakiman.

Kemudian pada tahun 1968 di Semarang diselenggarakan seminar hukum II yang membahas tentang hukum pidana dan HAM.

2. Pada tahun 1973 panitia intern Departemen Kehakiman menyusun naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP), namun mengalami jalan buntu.

3. Pada tahun 1974 menteri kehakiman Prof. Mochtar Koesoemoatmaja mengintensifkan pembuatan RUUHAP dan menyerahkan draf V RUUHAP kepada kabinet.

4. Pada tahun 1979 tepatnya pada tanggal 12 September RUUHAP yang merupakan draf ke5 diserahkan ke DPR RI untuk dibahas.

5. RUUHAP disetujui dalam sidang gabungan (SIGAB) Komisi I dan III DPR RI pada tanggal 9 September 1981.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*

6. Pada tanggal 31 Desember 1981 RUUHAP disahkan oleh presiden menjadi Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ditempatkan dalam Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76.

Melalui Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, segala peraturan yang sebelumnya telah ada dan berlaku dinyatakan dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam praktek dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pemakaian istilah KUHP pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur melalui Pasal 285 yaitu: "*Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*".

B. Pengertian Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana dikenal hukum pidana formal dan hukum pidana materiil. Hukum pidana formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya melaksanakan pemidanaan, sedangkan hukum pidana materiil merupakan hukum pidana yang berisi petunjuk tentang perbuatan yang dapat dipidana serta berapa lama seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus menjalani pidana.

Terkait dengan pengertian hukum pidana formal yang selanjutnya disebut hukum acara pidana, beragam pengertian yang disampaikan oleh para ahli hukum, secara umum pengertian yang diberikan para ahli tersebut merujuk kepada ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana dan bagaimana proses penegakan hukum yang harus dijalankan.

Pengertian hukum acara pidana yang dapat dirangkum dari para ahli hukum antara lain:

“Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut”.⁹

“Hukum Acara Pidana adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan cara-cara negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya dengan menghukum dan menjatuhkan hukuman, bilamana seseorang diduga melakukan tindak pidana”.¹⁰

“Hukum acara pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dengan kata lain, hukum acara pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.¹¹

“Hukum acara pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”.¹²

Menurut Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh M. Taufik Makarao dan Suhasril, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.¹³ Sedangkan Abdoel Djamali memberikan pengertian hukum acara pidana seperti berikut ini: “Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal

⁹ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.1

¹⁰ Ivan Zairani Lisi, *Hukum Acara Pidana*, FH Unmul, 2017, hal.6

¹¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1985, hal. 189

¹² Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 25

¹³ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 1

mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”.¹⁴

Luhut MP. Pangaribuan memberikan pengertian terhadap hukum acara pidana seperti berikut ini:¹⁵ “Hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana aparaturnya penegak hukum yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”. Dari beberapa pengertian hukum acara pidana tersebut di atas, dapat disimpulkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana aparaturnya penegak hukum bekerja dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana.

C. KUHAP Dan Hak Asasi Manusia

Seperti telah diurai sebelumnya, melalui Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu HIR, akan tetapi ketentuan yang tercantum didalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum begitu juga mengenai hak pemberian ganti kerugian tidak terdapat ketentuannya. Akibatnya kemudian dalam proses penegakan hukum pidana tidak tertutup kemungkinan melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

¹⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2010, hal. 199

¹⁵ Luhut MP. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hal. 13

KUHAP merupakan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Indonesia dalam bidang hukum acara pidana sebagai pengganti HIR.¹⁶ Melalui KUHAP diatur pelaksanaan penegakan hukum yang berdasarkan hak asasi manusia sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparaturnya penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

“Melalui undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakannya ke dalam golongan-golongan seperti yang berlaku pada hukum kolonial”.¹⁷

KUHAP memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.¹⁸ Diadakannya undang-undang hukum acara pidana tidak lain adalah dalam rangka mengatur kewenangan penegakan hukum pidana oleh pihak-pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain itu KUHAP merupakan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum¹⁹ dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, aparaturnya penegak hukum terikat dan

¹⁶ Hadirnya KUHAP ditujukan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam HIR, seperti memberikan jaminan pengakuan hak asasi manusia dan adanya pembatasan bertindak terhadap aparaturnya penegak hukum

¹⁷ Apri Listiyanto, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana”, *Rechts Vinding Online*, 2017, hal. 1

¹⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 10

¹⁹ Aparaturnya penegak hukum meliputi: penyidik, penuntut umum, advokat dan hakim sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya dalam proses penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, aparaturnya penegak hukum tidak boleh bertindak melebihi ketentuan yang terdapat dalam KUHAP

berpedoman kepada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KUHAP. Secara khusus, KUHAP ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam proses penegakan hukum, dan KUHAP merupakan *criminal justice system model* yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu di Indonesia. Singkatnya, KUHAP terbatas hanya untuk menegakkan keadilan dalam hukum pidana dari sudut pandang negara yang tetap dilandasi kepada hak asasi manusia.

D. KUHAP Sebagai Kodifikasi dan Unifikasi

“KUHP merupakan hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁰ “Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap”.²¹

Kodifikasi berarti menyusun buku yang memuat bidang hukum tertentu, yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.²² Kodifikasi hukum acara pidana adalah menghimpun ketentuan yang terkait dengan hukum acara pidana yang masih terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana. Tujuan umum kodifikasi adalah untuk kumpulan perundang-undangan itu sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti.²³

Kebijakan kodifikasi hukum acara pidana secara total difafsirkan sebagai kebijakan untuk menempatkan seluruh norma hukum acara pidana yang berlaku

²⁰ Penjelasan Umum KUHAP

²¹ Fenc M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hal. 37

²² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 73-74

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.92

secara nasional dalam satu kitab hukum acara pidana. Konsep “total” memberikan penekanan bahwa tujuan kodifikasi adalah:²⁴

1. Mencegah pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak terintegrasi dalam Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP; dan
2. Mencegah kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik bersifat umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana

Unifikasia dalah “hal menyatukan, penyatuan, dan hal menjadikan seragam.”²⁵ Unifikasi hukum meniscayakan bahwa hukum memerlukan kepastian.²⁶ “Unifikasi adalah upaya atau proses menyeragamkan substansi pengaturan sistem-sistem hukum”.²⁷ Dengan adanya unifikasi akan didapat kepastian dan keseragaman hukum dalam wilayah Indonesia. Seperti halnya dalam hukum acara pidana, melalui unifikasi, hukum acara pidana tidak lagi beragam, melainkan seragam dalam wilayah hukum Indonesia.

Melalui kodifikasi dan unifikasi, seharusnya semua proses penegakan hukum pidana wajib berlandaskan kepada KUHP. Namun dalam praktek, karena banyak ditemukan perbuatan pidana²⁸ khusus yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kemudian perbuatan pidana khusus tersebut diatur dalam berbagai undang-undang, mengakibatkan KUHP sulit untuk dipertahankan sebagai sebuah kodifikasi dan unifikasi.

²⁴ Luthfi Widagdo Eddyono, *Melihat Rencana Kodifikasi Dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2015, hal. 18

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 1247

²⁶ M. Misbahul Mujib: “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat,” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, hal. 20

²⁷ Rocky Marbun dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta, 2012, hal. 321

²⁸ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku

“Hukum acara pidana perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum pidana materiil. Sedangkan hukum pidana materiil terus berkembang seiring dengan perubahan seperti tersebut di atas. Semakin tumbuh tindak pidana baru maka semakin beragam pula hukum acara pidana (khusus) yang muncul.”²⁹

Akibatnya kemudian satu kesatuan hukum acara pidana sulit terwujud, dalam hal demikian, seolah-olah Indonesia kembali ke jaman dahulu dimana hukum acara pidana terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*. Pengaturan perbuatan pidana khusus dalam sebuah undang-undang melahirkan hukum acara pidana khusus yang bersifat *lex specialis*, akibatnya KUHP bergeser menjadi *lex generalis*. Dengan adanya pergeseran dari *lex specialis* menjadi *lex generalis* mengakibatkan KUHP tidak lagi mengabdikan menjadi hukum acara pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi.

“Dengan situasi yang demikian, maka secara normatif kedudukan KUHP menjadi *lex generalis* berhadapan dengan peraturan yang lebih khusus itu. Konkritnya, kedudukan KUHP sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi hukum telah digeser secara diam-diam oleh praktek perundang-undangan”.³⁰

Pergeseran KUHP yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi juga dapat dilihat dalam hal-hal seperti berikut ini:

1. Berkaitan dengan pemeriksaan saksi, Pasal 160 ayat (1) huruf c menyatakan: “*Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut*”. Ketentuan tersebut akan sangat berbeda dengan yang

²⁹ Sulistyanta, “Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013, hal. 180

³⁰ Luhut MP. Pangaribuan, *Op. Cit.*, hal. 18

terdapat dalam SEMA Nomor: 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi Yang Diperintahkan Untuk Hadir Di Sidang Pengadilan. “Sehubungan...Hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan,...berkas perkara”. Ketentuan “wajib” yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP “tersandera” dengan hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan.

2. Dalam tindak pidana perikanan, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Perikanan, hukum acara mengikuti KUHAP, “Hukum acara pidana di bidang perikanan yang berlaku adalah UU Perikanan dan KUHAP dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis*”.³¹
3. Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP terdiri atas: *keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa*. Ketentuan ini sepertinya diperluas dengan alat bukti yang ada pada undang-undang perbuatan pidana tertentu. Contoh:
 - a. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk perbuatan pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun

³¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 66

selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”³²

- b. Pada perbuatan pidana informasi dan transaksi elektronik, alat bukti selain yang diatur dalam KUHP, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan butir 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Semestinya jika tetap ingin mempertahankan KUHP sebagai sebuah kodifikasi dan unifikasi, seharusnya semua proses penegakan hukum pidana baik terhadap perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHP maupun perbuatan pidana lainnya yang tidak diatur di dalam KUHP tetap berpedoman kepada KUHP secara utuh, sehingga hukum acara pidana yang beraneka warna (pluralisme hukum) tidak terjadi.

Terjadinya penyimpangan hukum acara pidana tidak secara utuh menggunakan KUHP dalam proses penegakan hukum pidana tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP.³³ Pasal tersebut membuka peluang dipakainya hukum acara pidana khusus dalam perbuatan pidana yang diatur di

³² Lihat Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³³ Pasal 284 ayat (2) KUHP: *Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi*

luar KUHP. “KUHP (UU No. 8 tahun 1981) memberikan toleransi berlakunya hukum acara pidana khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 284 ayat (2)”.³⁴ Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP agaknya sangat kurang bersesuaian dengan amanat KUHP sebagai kodifikasi dan unifikasi dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum KUHP.

E. Sumber Formal Hukum Acara Pidana Indonesia

Sumber formal hukum acara pidana Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang dasar ini yang langsung berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah Pasal 24³⁵ dan Pasal 24 A³⁶ serta Pasal I Aturan Peralihan.³⁷
2. Undang-undang:
 - a. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

³⁴ Sulistyanta, *Op. Cit.*, hal.182

³⁵ Pasal 24:

- (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;*
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi;*
- (3) *Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang;*

³⁶ Pasal 24A:

- (1) *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;*
- (2) *Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;*
- (3) *Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;*
- (4) *Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung;*
- (5) *Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.*

³⁷ Pasal I Aturan Peralihan: *Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*

- b. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- c. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- h. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- i. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- j. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- k. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- m. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1980 tentang tindak Pidana Suap; dan
- n. Undang-Undang Tindak pidana Khusus lainnya.

F. Keadilan Yang Diinginkan

Secara umum dapat digambarkan bahwa keadilan yang diinginkan Rakyat Indonesia adalah keadilan yang berdasarkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ketentuan ini menghendaki bahwa keadilan tidak hanya ingin dicapai oleh sebagian rakyat, namun seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia sebagaimana

dikemukakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, “melindungi segenap bangsa Indonesia...perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

“Hukum dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*), terutama untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya”.³⁸

Keadilan merupakan kehendak yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena itu seluruh saluran hukum yang ada harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak, keseimbangan hukum dalam rangka menegakkan keadilan harus menjadi prioritas dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka, seperti telah diuraikan di muka, institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.”³⁹

“Melepaskan hukum dari keadilan cukuplah sulit dan bukan hal yang gampang karena secara politis akan terkait dengan bagaimana menciptakan hukum sebagai sebuah keadilan, sementara itu konsep keadilan bagi semua orang tidaklah sama.”⁴⁰

Jika merujuk kemudian ke dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai sumber formil hukum acara pidana Indonesia, akan sangat dirasakan masih terdapat perwujudan keadilan yang kurang memihak kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan bagi korban. Kepentingan hukum korban tidak secara berimbang diatur dengan kepentingan pelaku

³⁸ Budi Sastra Panjaitan, “Forum *Privilegiatum* Sebagai Wujud Peradilan Yang Adil Bagi Masyarakat, *Jurnal Media Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 25, No.1/Juni 2018, hal. 41

³⁹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 118

⁴⁰ Budi Sastra Panjaitan, *Op. Cit.*

tindak pidana, akibatnya kemudian peradilan pidana dapat menjadi bias hanya semata-mata tempat mencari keadilan bagi pelaku tindak pidana.

Jika hal tersebut di atas kemudian dibiarkan tanpa memberikan solusi hukum yang tepat, tidak tertutup kemungkinan ketidakpuasan atas penegakan hukum pidana berlanjut kepada pendendam yang berkepanjangan, akibatnya kemudian akan melahirkan perbuatan pidana baru. Ketidakpuasan atas penegakan hukum pidana dari sisi korban dapat dilihat dari berbagai pemberitaan media yang menampilkan korban yang tidak puas atas penghukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kepentingan korban diwakili secara langsung oleh negara melalui alat-alat kekuasaannya, Polisi, Jaksa dan Hakim. Sementara itu kepentingan hukum terdakwa diwakili oleh terdakwa secara langsung. Dalam posisi yang demikian dimana kepentingan hukum korban diwakili oleh institusi negara tidak menutup peluang terjadinya “kolusi” antara oknum institusi negara dengan korban secara langsung. Jika hal tersebut terjadi, korban akan menjadi korban kembali, pertama korban karena perbuatan terdakwa dan kedua korban karena kolusi antara oknum institusi negara dengan pelaku.

Dalam rangka memposisikan kembali keseimbangan keadilan antara korban dan pelaku, sewajarnya hukum acara pidana Indonesia kemudian ditinjau untuk diperbaiki menjadi lebih baik, paling tidak ada peluang korban untuk secara langsung dapat mengakses peradilan pidana jika kemudian kepentingan hukumnya dirugikan atas tindakan oknum aparaturnya yang “bermain-main” dengan terdakwa. Keseimbangan keadilan tersebut mutlak dibutuhkan agar penghukuman yang

diberikan hakim terhadap terdakwa menjadi benteng terakhir dalam penyelesaian perkara-perkara pidana di Indonesia.

G. Penutup

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut menginspirasi keadilan merupakan hak setiap orang, keadilan dalam kondisi bagaimanapun harus diwujudkan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum pidana baik bagi korban maupun oleh pelaku tindak pidana.

Dalam hubungannya dengan penegakan keadilan, keberadaan hukum acara pidana Indonesia merupakan bagian yang teramat penting dalam proses penegakan keadilan. Keseimbangan keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana harus diwujudkan dengan melakukan perbaikan terhadap hukum acara pidana Indonesia, sehingga keadilan dapat diwujudkan sebagai kehendak sosial seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2010
- Eddyono Luthfi Widagdo, *Melihat Rencana Kodifikasi Dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2015
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Lisi Ivan Zairani, *Hukum Acara Pidana*, FH Unmul, 2017
- Makarao M. Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Marbun Rocky dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta, 2012
- Muhammad H. Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Pangaribuan Luhut MP., *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Salam Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1985
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Soekanto Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980
- Wantu Fence M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015

B. Jurnal:

Listiyanto Apri, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana", *Rechts Vinding Online*, 2017

Mujib M. Misbahul: "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014

Mulyadi Lilik, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013

Panjaitan Budi Sastra, "Forum *Privilegiatum* Sebagai Wujud Peradilan Yang Adil Bagi Masyarakat, *Jurnal Media Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 25, No.1/Juni 2018

Sulistiyanta, "Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1942